

**FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PARKIR LIAR
(Studi di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

M. RIZKI FITRA RAMADHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PARKIR LIAR (Studi di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

**Oleh
M. Rizki Fitra Ramadhan**

Praktik parkir liar memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan perkotaan. Selain mengganggu estetika kota, parkir liar sering kali menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Fenomena ini juga meningkatkan potensi konflik sosial, baik antara pelaku parkir liar dengan warga maupun antar masyarakat yang merasa terganggu oleh penggunaan ruang publik yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena parkir liar di Kecamatan Kedaton disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir resmi di kawasan padat aktivitas, lemahnya pengawasan aparat, adanya oknum juru parkir ilegal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban parkir. Praktik ini menimbulkan dampak sosial berupa kemacetan lalu lintas, menurunnya kenyamanan pengguna jalan, timbulnya konflik sosial, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban ruang publik.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Parkir Liar.

ABSTRACT

CAUSES AND SOCIAL IMPACTS OF ILLEGAL PARKING

By

M. Rizki Fitra Ramadhan

The practice of illegal parking has a significant impact on urban life. In addition to disrupting the city's aesthetics, illegal parking is often a major cause of traffic congestion, especially during peak hours. This phenomenon also increases the potential for social conflict, both between illegal parking attendants and residents, as well as among community members disturbed by the unauthorized use of public spaces. This study aims to analyze the causes and social impacts of illegal parking in the Kedaton District of Bandar Lampung City. The research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that illegal parking in Kedaton District is caused by the limited availability of official parking areas in high-activity zones, weak law enforcement, the presence of illegal parking attendants, and low public awareness of parking order. This practice results in social impacts such as traffic congestion, reduced comfort for road users, the emergence of social conflicts, and decreased public trust in the local government's performance in maintaining public order.

Keywords: *Causes, Social Impact, Illegal Parking.*

**FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL PARKIR LIAR
(Studi di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

Oleh

M. Rizki Fitra Ramadhan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIAL**

Pada

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL
PARKIR LIAR (Studi Di Wilayah Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M Rizki Fitra Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa : **2016011043**

Jurusan : **Ilmu Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Pafrul Syah, M.H.
NIP. 196310121994031002

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.
NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Pairul Syah, M.H.



Penguji Utama : Drs. Suwarno, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2026



M. Rizki Fitra Ramadhan
NPM. 2016011043

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Desember 2001. Penulis adalah anak pertama dan satu satunya dari pasangan Bapak Indra dan Ibu Perlina. Berikut adalah riwayat pendidikan formal yang pernah penulis tempuh dengan beberapa jenjang, yakni:

1. Taman Kanak-kanak (TK) diselesaikan penulis di TK Bona Kota Serang, pada tahun 2008.
2. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan penulis di SDN 12 Kota Serang pada tahun 2014.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Kota Serang pada tahun 2017.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Kota Serang pada tahun 2020.

Tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada tahun 2022 penulis mengikuti Organisasi Kemahasiswaan (HMJ Sosiologi). Pada tahun 2023 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 10 Agustus 2023-10 Januari 2024 di Kesbangpol Provinsi Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah : 286)

“Tidak ada yang berputus asa dari Rahmat tuhan, kecuali orang yang sesat”

(QS Al-Hijr : 56)

“ Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba”

(Dzawin Nur)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah Hirobbil Alamin,

Segala puji serta Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat, hidayah, ridho, serta kemudahan yang telah dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud rasa Syukur. Sehingga penulis dapat mempersembahkan karya sedehana ini kepada:

Keluarga

Bapak Indra dan Ibu Perlina

Sahabat-sahabatku

Terima kasih kepada teman teman seperjuangan di Jurusan Sosiologi, semoga amal kebaikan yang sudah dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga cita-cita atau harapan yang kalian inginkan segera tercapai.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyajikan skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Parkir Liar (Studi di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** dan dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memeberikan dukungan, bantuan, motivasi, bimbingan, kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari subtransi materi maupun tata Bahasa, mengingat kapasitas serta pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sangat menerima segala masukan guna perbaikan ke depannya. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT tuhan yang maha Esa berkat rahmat, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Atas rahmat-Nya pula, penulis senantiasa dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan bimbingan dalam menjalani seluruh proses akademik.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi, hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas doa, didikan, pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk yang sudah diberikan hingga tidak ternilai harganya dan telah kalian berikan tanpa batas. Terima kasih juga atas dukungan dan motivasi yang tiada henti. Saya tidak bisa membalas semuanya itu, selain mengucapkan terima kasih tulus dari hati.
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
6. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak, yang sudah banyak atas dedikasi waktunya, bimbingan, arahan, dan masukan-masukan yang sudah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Drs. Suwarno, M.H., selaku dosen pembahas skripsi. Saya ucapkan terima kasih bapak yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran, masukan-masukan yang bermanfaat guna menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
8. Ibu Dr. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si selaku dosen pembimbing akademik. Saya Ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu, memeberikan dukungan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini dan selama proses perkuliahan.
9. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi yang sudah berbagi ilmu serta pengalaman yang berharga dan bermanfaat selama proses perkuliahan. Tidak lupa juga Terima kasih kepada staff administrasi Jurusan Sosiologi Mas Edi, Mas Daman dan seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan lainnya yang sudah diberikan selama ini.
10. Teman-teman sosiologi angkatan 20, Rohmad Maulana, Aldi Rizky Julian, Muhammad Dhaffa Adz Zidqy, Rendi Wulanggeni, Wahyu Putra Santoso, Rendi Kurniawan, Azzam Giri, Alfiando Rekas Pratama, Ferdi Bimantoro, Muhammad Fabrizio Fadly, Muhammad Gilar Buana, Bagus Prabowo, Muhammad Faruq, Irfan Thariq, dan Andika Pranoto, Valerian Calvin Havidio, Doni Juliansyah, serta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya, dukungan, bantuan sampai saat ini. Semoga doa, harapan, cita-cita semuanya dapat segera terwujud.
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Namun demikian, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan hasil penelitian ini secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi penulis sendiri, maupun sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi pembaca yang tertarik pada topik penelitian ini.

Bandar Lampung, 25 Juni 2026
Penulis

M. Rizki Fitra Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Secara Teoritis.....	4
1.4.2 Secara Praktis	5
1.5 Kerangka Berfikir.....	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Parkir Liar	7
2.1.1 Pengertian Parkir Liar	7
2.1.2 Faktor Penyebab Parkir Liar	8
2.2 Dampak Sosial	9
2.2.1 Definisi Dampak Sosial.....	9
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak Sosial	12
2.2.3 Masalah Dampak Sosial.....	12
2.2.4 Dampak Sosial Parkir Liar	14
2.3 Penelitian Terdahulu	15
2.4 Landasan Teori.....	17
2.4.1 Teori Strain.....	17
2.4.2 Teori Konflik Sosial.....	19

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Informan Penelitian.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Teknik Pengolahan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Teknik Keabsahan Data	26

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Bandar Lampung	28
4.2 Kecamatan Kedaton	29
4.3 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	31
4.4 Permasalahan Parkir di Kota Bandar Lampung	34

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	36
5.1.1 Faktor Penyebab Parkir Liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	36
5.1.2 Dampak Sosial Parkir Liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	49
5.2 Pembahasan.....	62
5.2.1 Faktor Penyebab Parkir Liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	62
5.2.2 Dampak Sosial Parkir Liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	67

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir	6

DAFTAR LAMPIRAN

Panduan Wawancara

Dokumentasi Hasil Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Kedaton di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, baik dari segi ekonomi maupun populasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (2024), Kecamatan Kedaton mencatat peningkatan populasi sebesar 3,5% per tahun, sementara aktivitas ekonomi tumbuh sekitar 4,8% per tahun. Pertumbuhan ini terlihat dari berkembangnya pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional, serta meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan ini memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah kebutuhan fasilitas parkir yang memadai, khususnya di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jalan Teuku Umar, Jalan Zainal Abidin Pagaralam, dan area sekitar Mall Boemi Kedaton. Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (2024) menunjukkan bahwa fasilitas parkir resmi hanya mampu memenuhi sekitar 65% dari total kebutuhan parkir di Kecamatan Kedaton. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan munculnya praktik parkir liar di berbagai titik strategis.

Praktik parkir liar memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan perkotaan. Selain mengganggu estetika kota, parkir liar sering kali menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Fenomena ini juga meningkatkan potensi konflik sosial, baik antara pelaku parkir liar dengan warga maupun antar masyarakat yang merasa terganggu oleh penggunaan ruang publik yang tidak sah. Dampak lain adalah gangguan terhadap kenyamanan dan

ketertiban umum, serta ketidakadilan sosial yang timbul akibat penguasaan ruang publik oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Situasi ini mencerminkan lemahnya Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung mengenai pengelolaan parkir, saat ini terdapat peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan parkir seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030. Serta Undang-Undang dan Peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96.

Beberapa penelitian terkait parkir liar memberikan gambaran awal untuk mendalami fenomena ini, Prasetyo (2020) dalam penelitiannya "Analisis Faktor Penyebab Parkir Liar di Kota Surabaya" menemukan bahwa kurangnya pengawasan dan mahalnya biaya parkir resmi menjadi pemicu utama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan dari pihak berwenang memberikan ruang bagi pelaku parkir liar untuk menjalankan praktik mereka tanpa hambatan. Selain itu, biaya parkir resmi yang dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat mendorong mereka untuk memilih alternatif parkir liar yang lebih murah, meskipun ilegal. Prasetyo juga menyoroti peran kebijakan pemerintah daerah yang belum optimal dalam menyediakan fasilitas parkir yang terjangkau dan memadai sebagai faktor pendukung keberlanjutan praktik ini. Studi ini menjadi rujukan penting dalam memahami kompleksitas masalah parkir liar, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi.

Rahayu (2021), dalam penelitiannya yang berjudul *"Dampak Sosial Parkir Liar terhadap Masyarakat Perkotaan"*, mengungkapkan bahwa praktik parkir liar tidak hanya memanfaatkan ruang publik secara tidak sah, tetapi juga sering kali menciptakan ketidakadilan sosial dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lain atas ruang tersebut. Fenomena ini, menurut Rahayu, memperparah ketimpangan sosial di perkotaan karena akses terhadap ruang publik yang seharusnya merata menjadi terganggu oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Wijaya (2023), dalam *"Studi Kriminologi Parkir Liar di Jakarta"*, menyimpulkan bahwa praktik parkir liar tidak hanya merupakan pelanggaran peraturan, tetapi juga sering kali melibatkan sindikat terorganisir yang mengambil keuntungan dari lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah. Sindikat ini memanfaatkan celah hukum dan kurangnya penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan sistem parkir liar yang terstruktur, sehingga memperburuk tata kelola perkotaan dan merugikan masyarakat luas.

Penelitian "Faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung" berbeda dengan penelitian lain seperti Prasetyo (2020), Rahayu (2021) dan Wijaya (2023) karena mengadopsi pendekatan sosiologis yang fokus pada faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Sementara itu, Prasetyo (2020) lebih mengutamakan analisis faktor penyebab parkir liar di Surabaya dengan pendekatan kebijakan dan tata ruang, Rahayu (2021) menyoroti dampak sosial yang lebih luas terhadap ketidakadilan sosial di perkotaan, dan Wijaya (2023) menggunakan pendekatan kriminologi untuk mengkaji peran sindikat serta kelemahan regulasi dalam mendukung praktik parkir liar di Jakarta. Dengan demikian, penelitian di Kedaton lebih spesifik dan lokal, sementara yang lain lebih umum atau teknis dalam konteks kota besar.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan fokus pada dinamika sosial kriminalitas parkir liar di Kecamatan Kedaton, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menyoroti aspek tata ruang dan ekonomi, tetapi juga mengkaji faktor penyebab, dampak sosial, dan

potensi solusinya. Dengan menggunakan data empirik hasil observasi dan wawancara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena parkir liar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir. Dengan demikian, solusi berkelanjutan terhadap masalah parkir liar di Kecamatan Kedaton dapat tercapai, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih tertib, adil, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini mengenai “Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Parkir Liar (Studi di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah faktor penyebab parkir liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah dampak sosial parkir liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab parkir liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial parkir liar di Wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan kajian sosiologi perkotaan, khususnya dalam memahami

fenomena kriminalitas parkir liar yang semakin marak di kawasan perkotaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik parkir liar terhadap struktur sosial dan interaksi antarwarga, serta untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana fenomena ini memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik dari segi ketidakadilan, ketimpangan ruang publik, maupun pengaruhnya terhadap mobilitas dan kualitas hidup warga kota. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

1.4.2 Secara Praktis

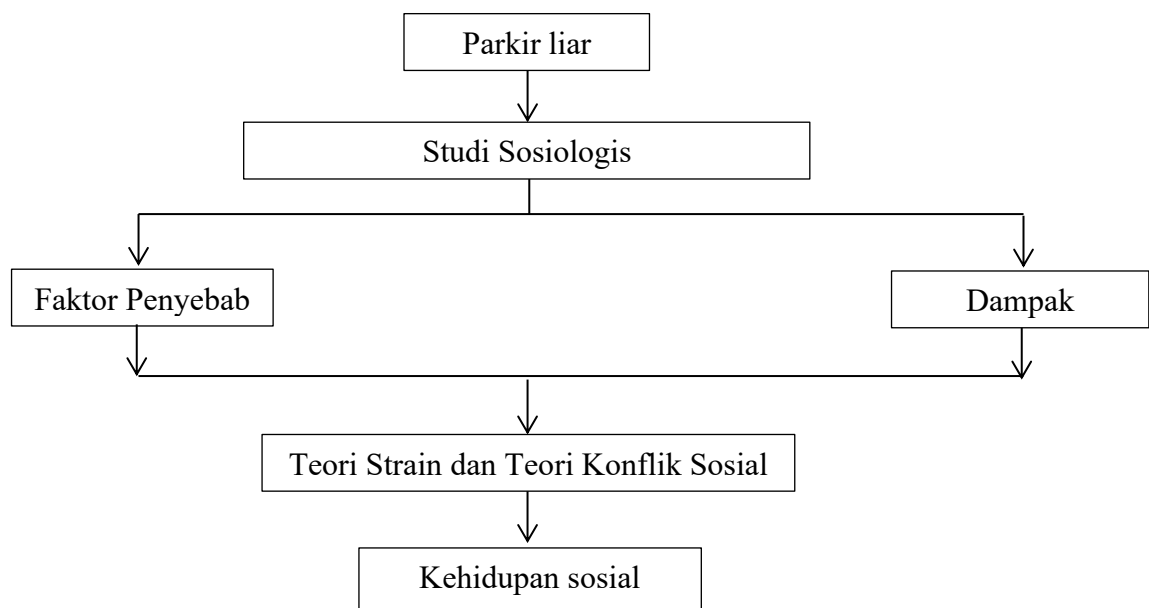
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi praktik parkir liar. Rekomendasi tersebut mencakup perlunya penguatan regulasi yang lebih tegas, peningkatan pengawasan terhadap area parkir publik, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif parkir liar terhadap ketertiban umum dan kualitas hidup perkotaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk merumuskan strategi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, seperti penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan efisien di area rawan parkir liar.

1.5 Kerangka Berfikir

Kriminalitas parkir liar merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di wilayah perkotaan, dipicu oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan akan ruang parkir dan keterbatasan fasilitas yang disediakan pemerintah. Masalah ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga menciptakan berbagai konflik sosial, seperti ketegangan antara pelaku parkir liar dan masyarakat yang terdampak. Fenomena ini memerlukan kajian sosiologis untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, sehingga dapat ditemukan solusi yang relevan. Perspektif teori strain dari Robert K. Merton,

parkir liar dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi terhadap ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai oleh individu, seperti kemudahan akses parkir, dan sarana yang tersedia. Teori konflik sosial memberikan penjelasan tentang ketegangan yang muncul antara pelaku parkir liar, masyarakat, dan pemerintah akibat perbedaan kepentingan. Teori interaksi simbolik menyoroti bagaimana interaksi antara pelaku parkir liar dan masyarakat membentuk persepsi serta tindakan yang memperkuat atau mengurangi fenomena ini.

Parkir liar memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, seperti meningkatkan konflik antarwarga, degradasi ruang publik, dan terganggunya kualitas hubungan sosial di komunitas lokal. Sementara itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kriminalitas parkir liar, menganalisis dampaknya terhadap hubungan sosial, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, dengan harapan memberikan solusi yang holistik dan berkelanjutan.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Parkir Liar

2.1.1 Pengertian Parkir Liar

Parkir liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang tidak hanya merusak tatanan kota, tetapi juga menciptakan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan perkotaan. Keberadaan kendaraan yang diparkir sembarangan sering kali mengganggu kelancaran lalu lintas, mempersempit ruang jalan, dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, parkir liar dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di kawasan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga ketertiban kota (Adisasmito, 2021).

Jaya dan Purnama (2023) menyoroti bahwa praktik parkir liar cenderung marak di wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Ketidakseimbangan antara meningkatnya jumlah kendaraan dan minimnya fasilitas parkir resmi sering kali memaksa pengendara untuk memanfaatkan area-area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Kondisi ini mencerminkan kurangnya perencanaan tata ruang yang berorientasi pada kebutuhan mobilitas masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan di kawasan urban. Akibatnya, praktik parkir liar tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap efisiensi transportasi dan aktivitas sehari-hari.

Pertumbuhan pusat perbelanjaan yang pesat serta berkembangnya usaha mikro semakin memperparah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Semakin banyaknya pusat-pusat komersial dan usaha kecil yang menarik kerumunan pengunjung, tetapi tidak diimbangi dengan perencanaan ruang parkir yang sesuai, membuat masalah parkir liar semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur yang matang sangat penting untuk mengatasi masalah tata ruang yang semakin kompleks, agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepadatan bangunan, mobilitas masyarakat, dan penyediaan fasilitas yang memadai (Adisasmito, 2021). Tanpa perencanaan yang terintegrasi, masalah parkir akan terus menjadi hambatan bagi kelancaran lalu lintas dan kualitas hidup warga kota.

2.1.2 Faktor Penyebab Parkir

Parkir liar muncul sebagai dampak dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan fasilitas publik yang memadai dan lemahnya penegakan hukum. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang semakin meningkat dengan minimnya jumlah dan kualitas fasilitas parkir resmi semakin memperburuk situasi. Menurut Darmawan (2020), ketidakseimbangan ini menjadi akar masalah utama dalam tata ruang di kota-kota berkembang. Terbatasnya ruang untuk fasilitas publik yang efektif, seperti tempat parkir yang terorganisir, mengakibatkan pengendara memilih untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang tidak semestinya. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap parkir liar semakin memperburuk masalah ini, sehingga menambah kesulitan dalam mengelola tata ruang kota secara optimal.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya parkir liar antara lain:

1. Kurangnya fasilitas parkir

Minimnya penyediaan ruang parkir yang memadai di kawasan kota atau area pusat kegiatan menyebabkan pengemudi mencari tempat parkir alternatif yang tidak sah.

2. Tingkat kesadaran rendah

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas dan dampak negatif dari parkir liar terhadap kenyamanan dan keselamatan.

3. Penegakan hukum yang lemah

Tidak adanya atau lemahnya pengawasan serta tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap pelanggaran parkir liar.

4. Keterbatasan ruang di kawasan perkotaan

Tingginya tingkat urbanisasi dan pembangunan yang mengurangi ruang terbuka, yang mengarah pada kebutuhan parkir yang lebih tinggi tanpa infrastruktur yang memadai.

5. Kebiasaan dan budaya

Beberapa masyarakat menganggap parkir liar sebagai hal yang biasa dan tidak merugikan, sehingga tidak merasa perlu mencari solusi yang sesuai aturan (Siregar, 2021).

2.2 Dampak Sosial

2.2.1 Definisi Dampak Sosial

Dampak sosial merujuk pada pengaruh atau perubahan yang dialami oleh masyarakat akibat adanya aktivitas, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dampak ini mencakup perubahan dalam cara hidup masyarakat, relasi sosial, nilai-nilai yang dianut, kebiasaan sehari-hari, serta pola pikir yang berkembang. Secara umum, dampak sosial dapat membawa efek positif, seperti peningkatan kualitas hidup, kesempatan ekonomi yang lebih baik, atau kemajuan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, dampak sosial juga dapat bersifat negatif, seperti munculnya konflik sosial, ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, atau bahkan degradasi lingkungan yang merugikan keberlanjutan komunitas. Pemahaman terhadap dampak ini sangat penting untuk memitigasi risiko dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dari setiap kebijakan atau aktivitas yang dilakukan. (Sunarto, 2021).

Dampak sosial adalah konsekuensi yang timbul dalam kehidupan manusia akibat tindakan atau intervensi yang mengubah kondisi sosial atau lingkungan fisik di sekitarnya. Dampak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dampak sosial juga dapat memengaruhi kohesi sosial, yaitu tingkat solidaritas, harmoni, dan hubungan antaranggota masyarakat yang mendukung keberlangsungan komunitas. Dalam konteks ini, dampak sosial dapat berwujud positif, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan atau terciptanya rasa aman melalui kebijakan tertentu, tetapi juga dapat bersifat negatif, seperti gangguan pada stabilitas sosial atau meningkatnya ketidaksetaraan dalam komunitas. Pemahaman mendalam terhadap dampak ini diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas (Budi, 2022).

Dampak sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam struktur, hubungan, dan kesejahteraan masyarakat yang muncul sebagai akibat dari aktivitas pembangunan, kebijakan, atau intervensi tertentu. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi cara hidup masyarakat. Dampak sosial dapat berupa transformasi dalam hubungan antarindividu atau kelompok, pergeseran nilai-nilai budaya, hingga perubahan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi atau layanan publik. Selain itu, dampak sosial juga berpotensi membawa pengaruh positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan komunitas, namun di sisi lain, juga dapat menimbulkan efek negatif, seperti konflik sosial, ketimpangan ekonomi, atau marginalisasi kelompok tertentu. Memahami dampak sosial secara menyeluruh sangat penting untuk merancang kebijakan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Haryanto, 2023).

Dampak sosial adalah konsekuensi yang dapat diamati maupun dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari interaksi manusia dengan proyek, kebijakan, atau peristiwa tertentu. Dampak ini mencakup berbagai aspek perubahan yang terjadi, seperti pada kebiasaan sehari-hari, pola interaksi sosial, hingga nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tertentu. Dampak sosial dapat memberikan pengaruh

positif, seperti peningkatan solidaritas dan inovasi dalam cara hidup, tetapi juga dapat berkontribusi pada efek negatif, seperti terganggunya harmoni sosial atau hilangnya tradisi lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak sosial sangat penting untuk mengelola perubahan yang terjadi agar sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak (Sunarto, 2021).

Dampak sosial adalah segala perubahan pada kualitas hidup masyarakat yang muncul akibat dari suatu tindakan atau keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ini mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan individu, keberlanjutan komunitas, dan akses terhadap sumber daya atau layanan publik. Dalam konteks ini, dampak sosial tidak hanya terlihat dalam perubahan ekonomi atau fisik, tetapi juga pada struktur sosial dan hubungan antaranggota masyarakat. Perubahan ini dapat memengaruhi stabilitas sosial, menciptakan peluang baru, atau bahkan memunculkan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak sosial secara menyeluruh agar kebijakan dan tindakan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat (Budi, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat aktivitas, kebijakan, atau peristiwa tertentu yang memengaruhi berbagai aspek, seperti struktur sosial, hubungan antarindividu, nilai-nilai budaya, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak ini bersifat multidimensional, mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dapat memberikan manfaat positif, seperti peningkatan kesejahteraan, atau menimbulkan kerugian, seperti konflik sosial dan penurunan kualitas hidup. Selain itu, dampak sosial dapat terukur secara konkret melalui perubahan pola kehidupan masyarakat maupun dirasakan secara subjektif oleh individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial penting untuk merancang intervensi yang adil, berkelanjutan, dan meminimalkan efek negatif bagi masyarakat.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dampak Sosial

Beberapa faktor yang memengaruhi dampak sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Perubahan dalam struktur ekonomi, seperti munculnya lapangan kerja baru atau peningkatan pendapatan, dapat memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan konflik sosial (Haryanto, 2023).

2. Faktor Politik

Kebijakan pemerintah, pengaturan hukum, dan stabilitas politik memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu aktivitas dapat memengaruhi masyarakat (Prasetyo, 2024).

3. Faktor Budaya

Perubahan nilai, tradisi, atau kebiasaan yang terjadi akibat adanya interaksi dengan budaya lain atau tekanan modernisasi dapat menimbulkan dampak sosial (Suryani, 2023).

4. Faktor Lingkungan Fisik

Pembangunan infrastruktur atau perubahan pada ekosistem lokal dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama yang bergantung pada sumber daya alam (Haryanto, 2023).

5. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi sering kali memengaruhi cara komunikasi, pendidikan, dan pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada struktur sosial masyarakat (Prasetyo, 2024).

6. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat memengaruhi cara mereka menerima atau menolak perubahan sosial yang terjadi (Suryani, 2023).

2.2.3 Masalah Dampak Sosial

Masalah dampak sosial sering kali muncul ketika perubahan yang terjadi membawa konsekuensi negatif bagi masyarakat. Menurut Wahyuni (2024) Beberapa masalah tersebut meliputi:

1. Ketimpangan Sosial

Pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di mana sebagian masyarakat mendapat manfaat lebih dibandingkan kelompok lain.

2. Pengangguran

Meskipun pembangunan menciptakan lapangan kerja baru, tidak semua individu memiliki keterampilan yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut, sehingga pengangguran tetap menjadi masalah.

3. Konflik Sosial

Perbedaan pandangan, kepentingan, atau akses terhadap sumber daya sering kali memicu konflik antarindividu atau kelompok masyarakat.

4. Disintegrasi Komunitas

Perubahan besar yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan hilangnya solidaritas atau kohesi sosial dalam masyarakat.

5. Penurunan Kesejahteraan Mental

Ketidakpastian dan perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan stres atau gangguan mental bagi masyarakat, terutama yang sulit beradaptasi.

6. Kerusakan Lingkungan

Dampak sosial sering kali berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan, seperti berkurangnya akses terhadap sumber daya alam yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Menurut Azizah (2023), masalah dampak sosial dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Alienasi Sosial

Alienasi sosial adalah kondisi di mana individu merasa terisolasi atau terputus dari komunitas sosialnya. Hal ini sering terjadi akibat perubahan besar, seperti urbanisasi, modernisasi, atau pengenalan teknologi baru yang mengubah cara orang berinteraksi.

2. Disparitas Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar sering kali menjadi dampak sosial yang signifikan dari pembangunan yang tidak merata. Hal ini

dapat memicu rasa ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan bahkan konflik antar kelompok masyarakat.

3. Marginalisasi

Marginalisasi terjadi ketika kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti minoritas atau masyarakat adat, kehilangan akses terhadap sumber daya atau terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.

4. Kehilangan Identitas Budaya

Proses globalisasi dan modernisasi sering kali menyebabkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya lokal, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan identitas budayanya.

5. Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial merujuk pada tingkat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan besar, seperti bencana alam, pergeseran ekonomi, atau perubahan lingkungan. Masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif.

6. Ketidakstabilan Sosial

Perubahan yang cepat dan drastis dapat memicu ketidakstabilan sosial, di mana norma dan aturan sosial terganggu, menyebabkan ketidakpastian dalam hubungan sosial dan struktur komunitas.

2.2.4 Dampak Sosial Parkir liar

Parkir liar memiliki dampak yang luas, yang tidak hanya terbatas pada masalah kemacetan lalu lintas, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Jaya dan Purnama (2023) dampak sosial dari parkir liar antara lain:

1. Kemacetan lalu lintas

Parkir liar mengurangi ruang jalan yang seharusnya untuk kendaraan bergerak, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang memperlambat mobilitas masyarakat dan meningkatkan polusi udara.

2. Gangguan terhadap pejalan kaki

Trotoar yang dipakai untuk parkir liar menghalangi akses pejalan kaki, terutama bagi penyandang disabilitas atau ibu dengan anak kecil, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan bahaya.

3. Kerusakan infrastruktur

Parkir liar sering menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, seperti trotoar, yang seharusnya dipergunakan untuk berjalan kaki, serta pengurangan kualitas ruang publik lainnya.

4. Ketidakadilan sosial

Parkir liar seringkali terjadi di daerah yang padat dan dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, di mana pemilik kendaraan yang lebih mampu menggunakan ruang secara tidak sah, sementara masyarakat dengan akses terbatas mengalami kesulitan.

5. Peningkatan konflik sosial

Ketegangan antarwarga atau antar pengguna jalan bisa muncul akibat parkir liar, terutama jika ada klaim atau keluhan terkait pengambilan ruang publik yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang.

6. Keamanan dan keselamatan

Parkir liar dapat meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi pengendara lain yang harus menghindari kendaraan yang diparkir sembarangan, maupun bagi pejalan kaki yang harus menavigasi area yang terganggu oleh kendaraan parkir liar.

2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis	Judul	Metode	Hasil	Perbandingan Penelitian
Sari (2022)	Dinamika Konflik Sosial dalam Praktek Parkir Liar di Perkotaan	Studi kasus di wilayah perkotaan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif	Parkir liar disebabkan oleh ketimpangan penyediaan fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Dampaknya meliputi kemacetan, konflik antarwarga, dan degradasi ruang publik.	Fokus penelitian ini serupa dalam menyoroti faktor penyebab kriminalitas parkir liar, namun penelitian saya menambahkan analisis tentang dampaknya terhadap hubungan sosial di komunitas lokal.
Putra (2021)	Perilaku Menyimpang dalam Praktik Parkir Liar di Kawasan Komersial	Metode kuantitatif dengan survei kepada pengguna parkir liar	Menemukan bahwa parkir liar umumnya dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan oleh otoritas.	Penelitian saya memperluas temuan ini dengan analisis sosiologis yang menekankan interaksi antara pelaku parkir liar, masyarakat terdampak, dan pemerintah.
Yuniarti (2020)	Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Parkir Liar di Wilayah Perkotaan	Pendekatan kriminologi dengan wawancara terhadap pelaku parkir liar	Pelaku parkir liar sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang melihatnya sebagai peluang	Penelitian saya akan mengkaji dampak sosial jangka panjang dari kriminalitas parkir liar terhadap komunitas

Penulis	Judul	Metode	Hasil	Perbandingan Penelitian
			ekonomi.	setempat.
Hasan (2023)	Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Parkir Liar	Studi kebijakan dengan analisis dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan	Kebijakan yang tidak tegas dan minimnya fasilitas menjadi hambatan utama dalam mengatasi parkir liar.	Penelitian saya akan memasukkan perspektif masyarakat tentang efektivitas kebijakan tersebut dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial.

Tabel ini menggambarkan berbagai penelitian terdahulu tentang parkir liar, yang secara umum menyoroti faktor penyebab, perilaku pelaku, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Penelitian Sari (2022) menyoroti ketimpangan fasilitas publik sebagai penyebab utama, sementara Putra (2021) menemukan lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum sebagai faktor penting. Yuniarti (2020) mengaitkan praktik parkir liar dengan tekanan ekonomi pada kelompok berpenghasilan rendah, sedangkan Hasan (2023) fokus pada kelemahan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Penelitian Anda memperluas wawasan ini dengan menganalisis dampak sosial parkir liar terhadap hubungan komunitas dan menilai efektivitas kebijakan dari sudut pandang masyarakat, memberikan kontribusi baru yang lebih holistik terhadap isu tersebut.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Strain

Teori Strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton (1938) adalah salah satu teori sosiologi yang berusaha menjelaskan penyebab perilaku menyimpang dalam masyarakat. Menurut Merton, perilaku menyimpang muncul sebagai respons terhadap ketegangan atau tekanan yang dialami individu ketika mereka tidak dapat mencapai tujuan sosial yang diinginkan dengan cara yang sah dan diterima oleh masyarakat. Merton mengemukakan bahwa masyarakat sering menetapkan tujuan-tujuan tertentu, seperti kesuksesan ekonomi atau status sosial, yang

dianggap sebagai ukuran pencapaian dalam hidup. Namun, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya atau kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Teori Strain menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah dapat menciptakan ketegangan atau strain, yang mendorong individu untuk mencari cara-cara alternatif yang tidak sesuai dengan norma sosial. Merton mengidentifikasi lima bentuk adaptasi yang dapat terjadi akibat strain ini, yaitu:

1. Konformitas

Individu yang tetap mengikuti norma dan aturan sosial meskipun mereka mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan.

2. Inovasi

Individu yang mencari cara-cara baru yang tidak sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya melalui perilaku menyimpang seperti kejahatan.

3. Ritualisme

Individu yang tidak lagi memperjuangkan tujuan utama (misalnya kesuksesan ekonomi) tetapi tetap mengikuti aturan secara berlebihan.

4. *Retreatism*

Individu yang menarik diri dari masyarakat dan tujuan yang ada, sering kali dengan cara yang ekstrem, seperti kecanduan atau perilaku lain yang mengasingkan diri.

5. Pemberontakan (*Rebellion*)

Individu yang menolak nilai dan tujuan masyarakat yang dominan dan mencoba menggantinya dengan nilai dan tujuan baru yang mereka anggap lebih sesuai.

Menurut Merton, perilaku menyimpang muncul terutama pada individu atau kelompok yang mengalami ketidakmampuan untuk mencapai tujuan masyarakat melalui cara yang sah, sehingga mereka mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Teori Strain ini memberikan pandangan penting tentang bagaimana struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang, dan menggarisbawahi pentingnya

akses yang setara terhadap kesempatan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan

Praktik parkir liar dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dan sarana yang tersedia. Dalam konteks ini, tujuan yang diinginkan oleh individu adalah kemudahan dalam mendapatkan akses parkir, sementara sarana yang disediakan oleh pemerintah terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitas ruang parkir. Hal ini menciptakan ketegangan atau strain yang dapat memotivasi individu untuk mencari cara alternatif, meskipun cara tersebut melanggar norma atau aturan yang ada. Merton, dalam teori Strain-nya, menjelaskan bahwa individu atau kelompok yang merasa terhalang oleh struktur sosial atau kebijakan yang ada akan cenderung mencari cara-cara inovatif untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, praktik parkir liar merupakan bentuk inovasi, di mana individu mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi dengan cara yang tidak sah, seperti memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir. Meskipun tindakan ini melanggar aturan, individu tersebut mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain karena terbatasnya fasilitas parkir yang disediakan, yang akhirnya mengarah pada perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial dan struktural yang mereka hadapi.

2.4.2 Teori Konflik Sosial

Teori Konflik Sosial juga dapat diterapkan untuk memahami dinamika interaksi antara kelompok pelaku parkir liar, masyarakat yang terdampak, dan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan ruang publik. Teori ini, yang dikembangkan oleh Karl Marx, berfokus pada ketegangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan akses terhadap sumber daya antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Dalam konteks parkir liar, terdapat konflik antara pelaku parkir liar yang berusaha mendapatkan akses parkir yang mudah dan cepat, masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan, serta pemerintah yang memiliki

kewenangan untuk mengatur penggunaan ruang publik namun sering kali terbatas dalam menyediakan fasilitas yang memadai.

Menurut teori konflik sosial, setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, dan konflik muncul ketika kepentingan tersebut tidak dapat dipenuhi secara adil. Kelompok pelaku parkir liar mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan akses yang cukup atau memadai terhadap fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka menggunakan cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak merasa dirugikan oleh praktik parkir liar yang dapat menyebabkan kemacetan, ketidaknyamanan, dan penurunan kualitas ruang publik. Pemerintah, yang seharusnya menjadi pihak yang netral dan mengatur ruang publik, sering kali menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan konflik ini, terutama jika kebijakan yang ada tidak memadai atau tidak dilaksanakan dengan tegas.

Sebagai contoh, penelitian oleh Sari (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan antara penyediaan fasilitas parkir di pusat kota dan kebutuhan masyarakat menyebabkan munculnya perilaku parkir liar. Pemerintah, dalam hal ini, perlu memperhatikan kepentingan semua pihak dengan menyediakan lebih banyak ruang parkir yang sesuai dan memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran parkir liar. Konflik yang terjadi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kebijakan publik yang perlu diselesaikan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan tertib.

Teori Konflik Sosial menyoroti ketegangan yang muncul antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pelaku parkir liar yang mencari keuntungan pribadi, masyarakat yang ingin menjaga ketertiban, dan pemerintah yang berupaya menegakkan hukum dan regulasi. Dalam konteks parkir liar, ketegangan ini muncul karena setiap pihak memiliki tujuan yang saling bertentangan. Pelaku parkir liar, yang sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, yaitu mendapatkan akses parkir yang mudah dan praktis. Sementara itu,

masyarakat yang terdampak merasa dirugikan oleh ketidakteraturan yang ditimbulkan, seperti kemacetan dan berkurangnya ruang parkir yang sah. Di sisi lain, pemerintah berhadapan dengan tantangan untuk menyeimbangkan antara menyediakan ruang parkir yang cukup dan efektif, serta menegakkan hukum yang berlaku agar ketertiban publik tetap terjaga. Teori ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kebijakan publik dapat memicu konflik yang perlu diselesaikan melalui dialog, perubahan kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2015).

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

3.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian ini memfokuskan faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar yang terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Faktor penyebab parkir liar
 - a. Kurangnya fasilitas parkir
 - b. Tingkat kesadaran rendah

- c. Penegakan hukum yang lemah
 - d. Keterbatasan ruang di kawasan perkotaan
 - e. Kebiasaan dan budaya
2. Dampak sosial dari parkir liar
- a. Kemacetan lalu lintas
 - b. Gangguan terhadap pejalan kaki
 - c. Kerusakan infrastruktur
 - d. Ketidakadilan sosial
 - e. Peningkatan konflik sosial
 - f. Keamanan dan keselamatan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dipilih sebagai lokasi penelitian terkait *faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar* karena kawasan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, ditandai oleh keberadaan pusat perbelanjaan, kampus, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Fenomena parkir liar kerap menjadi sumber keluhan masyarakat karena menyebabkan kemacetan, gangguan ketertiban, dan potensi konflik sosial. Selain itu, keragaman sosial ekonomi penduduk Kedaton, mulai dari pelaku usaha kecil hingga mahasiswa, memungkinkan penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial secara lebih mendalam. Berdasarkan pengamatan awal dan laporan masyarakat, wilayah ini memiliki dokumentasi yang relevan terkait permasalahan parkir liar, yang mendukung identifikasi faktor penyebab dan dampaknya.

3.4 Informan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, maka informan yang dilibatkan adalah informan adalah pelaku parkir liar, masyarakat yang terdampak, pemilik usaha di sekitar lokasi parkir liar, pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung atau pihak Kecamatan Kedaton, dosen di bidang sosiologi atau studi perkotaan, organisasi yang fokus pada isu perkotaan atau kesejahteraan masyarakat dan pengguna jasa parkir liar.

Jumlah informan yang didapatkan sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaku parkir liar sebanyak 2 orang
2. Masyarakat yang terdampak sebanyak 2 orang
3. Pemilik usaha di sekitar lokasi parkir liar sebanyak 2 orang
4. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebanyak 1 orang
5. Pihak Kecamatan Kedaton sebanyak 1 orang
6. Dosen di bidang sosiologi atau studi perkotaan sebanyak 1 orang
7. Organisasi yang fokus pada isu perkotaan atau kesejahteraan masyarakat dan pengguna jasa parkir liar sebanyak 1 orang.

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara mendalam

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap keterangan dari responden dengan menggunakan wawancara mendalam (*indeepth interview*). Sebelum wawancara dimulai, peneliti menceritakan terlebih dahulu pokok-pokok penelitian, kemudian subyek penelitian dibiarkan bercerita tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

2. Observasi

Digunakan peneliti dalam rangka pengamatan pada komunikasi faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder seperti data tentang gambaran faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut (Moleong, 2015). Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi:

1. *Editing*

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut. Tahapan *Editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi tentang faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan mengenai faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif yaitu penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti guna mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kondisi (Sugiyono, 2018).

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah penulis memperoleh data maka data yang penulis peroleh itu harus lebih dulu dikaji kelayakannya, dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini penulis menyajikan data yang dibutuhkan dengan menarik kesimpulan dan tindakan dalam penyajian data mengenai faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang jelas kebenarannya dan kegunaannya. Setelah seluruh data yang penulis peroleh, penulis harus benar-benar menguji kebenarannya untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dari data-data itu, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya dari faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data atau triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi-metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian. Tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan (Sugiyono, 2018).

Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber informasi, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam

metode kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan* mengenai faktor penyebab dan dampak sosial parkir liar. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan (Moleong, 2015).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, tepatnya di pesisir Teluk Lampung. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat antara 105°28' hingga 105°37' Bujur Timur dan 5°20' hingga 5°30' Lintang Selatan. Posisi strategis ini menjadikan Bandar Lampung sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatra dari arah Pulau Jawa, baik melalui jalur laut maupun darat. Dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembangunan regional. Selain itu, kota ini juga berkembang sebagai pusat pendidikan, dengan keberadaan berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di sektor ekonomi, Bandar Lampung tumbuh menjadi salah satu kota perdagangan dan jasa yang cukup pesat di Sumatra bagian selatan, didukung oleh infrastruktur perkotaan yang terus berkembang serta mobilitas penduduk yang tinggi. Hal ini menjadikan Bandar Lampung tidak hanya sebagai pusat aktivitas administratif, tetapi juga sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di wilayah Provinsi Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km² dan secara administratif terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk kota ini telah melampaui angka 1 juta jiwa, menjadikannya sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung. Pertumbuhan penduduk yang cepat, didukung oleh laju urbanisasi yang tinggi, mendorong terjadinya ekspansi permukiman, pertumbuhan kawasan perdagangan, dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini secara langsung berdampak pada

tingginya mobilitas penduduk dan volume kendaraan bermotor di dalam kota. Akibatnya, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui Dinas Perhubungan, dituntut untuk menghadirkan pelayanan perhubungan yang adaptif terhadap dinamika kota, baik melalui penguatan infrastruktur jalan, pengelolaan lalu lintas, hingga penyediaan angkutan umum yang memadai. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transportasi bukan hanya menjadi kebutuhan fungsional, tetapi juga menjadi indikator kualitas tata kelola perkotaan.

Pertumbuhan sektor transportasi merupakan salah satu elemen strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, kelancaran distribusi barang, serta percepatan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Di Kota Bandar Lampung, peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menjadi indikator kuat terhadap tingginya ketergantungan masyarakat terhadap moda transportasi pribadi. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepadatan lalu lintas, kemacetan di kawasan pusat kota, serta tekanan terhadap infrastruktur jalan yang tersedia. Seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dan mobilitas masyarakat, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah bagaimana mengelola sistem lalu lintas dan transportasi publik secara efektif. Upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertib membutuhkan perencanaan yang komprehensif, mulai dari regulasi lalu lintas, pengembangan transportasi massal yang terjangkau, hingga pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Di tengah laju urbanisasi yang pesat, pengelolaan transportasi tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga sebagai penentu kualitas hidup masyarakat kota dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

4.2 Kecamatan Kedaton

Kecamatan Kedaton terletak di bagian tengah Kota Bandar Lampung dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur tata ruang kota. Secara administratif, Kecamatan Kedaton berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan penting: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa yang merupakan pintu masuk utama Kota Bandar Lampung dari arah Jalan Lintas Sumatera, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Way Halim yang

merupakan kawasan bisnis dan perumahan berkembang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur yang merupakan kawasan pemerintahan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiling yang dikenal dengan kontur berbukit dan kawasan konservasi. Letak yang berada di antara pusat-pusat pertumbuhan ini menjadikan Kedaton sebagai simpul aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas penduduk.

Kecamatan Kedaton dari segi luas wilayah memiliki cakupan yang relatif kecil dibandingkan beberapa kecamatan lainnya di Bandar Lampung, namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara fungsi permukiman, pendidikan tinggi, perdagangan, serta aksesibilitas yang baik. Kondisi topografi Kedaton cenderung datar hingga landai, dengan sedikit kontur naik di bagian barat yang mulai menuju ke kawasan perbukitan Kemiling. Topografi yang relatif datar ini sangat mendukung pengembangan infrastruktur, permukiman padat, serta jaringan jalan kota.

Kepadatan penduduk dan fungsi lahan yang sangat beragam dalam ruang yang terbatas menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal tata kelola ruang publik. Permukiman padat yang tumbuh secara organik di beberapa kelurahan, seperti di Labuhan Ratu dan Kampung Baru, menyebabkan ruas jalan lokal menjadi sempit dan rentan terhadap gangguan lalu lintas, terutama akibat parkir kendaraan yang tidak tertib. Sementara itu, kawasan sekitar kampus Unila dan UIN Raden Intan Lampung mengalami tekanan pembangunan komersial yang cukup tinggi, ditandai dengan munculnya ruko, warung makan, kos-kosan, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan lahan parkir, ruang terbuka, dan fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas umum.

Secara klimatologis, Kecamatan Kedaton berada di wilayah beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Iklim ini mendukung vegetasi perkotaan yang baik, namun juga menuntut sistem drainase yang memadai agar tidak terjadi genangan air, terutama di jalan-jalan padat yang kerap digunakan sebagai area parkir liar. Ketika hujan turun deras, air tidak hanya

menggenangi ruas jalan utama, tetapi juga menyulitkan pejalan kaki karena trotoar sudah lebih dulu dipadati oleh kendaraan yang parkir secara ilegal.

Meskipun secara geografis dan topografis Kecamatan Kedaton memiliki keunggulan dalam aksesibilitas dan pengembangan ekonomi, namun kondisi ini perlu diimbangi dengan kebijakan tata ruang yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah kota perlu mengidentifikasi zona-zona rawan konflik penggunaan ruang, memperkuat regulasi penggunaan lahan, serta mendorong pembangunan infrastruktur vertikal seperti gedung parkir bertingkat dan ruang terbuka hijau yang ramah masyarakat. Penataan kawasan yang mengintegrasikan aspek fisik-geografis dan sosial-ekonomi sangat penting agar Kedaton tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi kawasan yang layak huni dan tertib secara tata kota.

4.3 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung merupakan instansi teknis yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, khususnya perhubungan darat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sistem transportasi, lalu lintas jalan, angkutan umum, perparkiran, serta pengelolaan terminal dalam wilayah administratif kota. Selain itu, Dishub juga berperan dalam merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional yang berkaitan dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, termasuk pengawasan terhadap trayek angkutan kota, manajemen rekayasa lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan penertiban parkir. Dalam konteks dinamika perkotaan yang semakin kompleks, Dishub memegang peran sentral dalam memastikan bahwa pelayanan transportasi di Kota Bandar Lampung berjalan secara efisien, tertib, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang berkualitas.

Secara struktural, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas

Perhubungan terbagi ke dalam beberapa bidang teknis dan unit pelaksana teknis yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam pengelolaan sistem transportasi di wilayah kota. Adapun struktur organisasi tersebut terdiri atas:

1. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas, yang bertugas mengatur, mengelola, dan merekayasa sistem lalu lintas guna menciptakan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Bidang ini juga melakukan pemantauan rambu, marka jalan, serta sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi.

2. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan, yang menangani perencanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum, termasuk pengaturan trayek, perizinan operasional, dan pembinaan terhadap operator angkutan.

3. Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran, yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir di wilayah kota, baik parkir *on-street* maupun *off-street*, termasuk penetapan zona parkir, pengawasan juru parkir, dan pengembangan sistem perparkiran digital.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana, yang berfokus pada penyediaan, pengembangan, serta pemeliharaan fasilitas transportasi dan infrastruktur pendukung, seperti halte, terminal, rambu lalu lintas, dan perlengkapan keselamatan jalan.

5. UPTD Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor

UPTD Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang berperan sebagai unit pelaksana teknis dalam pengelolaan terminal penumpang dan pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor secara berkala, guna menjamin keamanan dan keselamatan transportasi umum.

Fungsi utama Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mencakup pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sistem lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah kota. Dalam menjalankan fungsinya, Dishub memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis, menyusun program kerja transportasi, serta mengimplementasikan berbagai strategi pengelolaan lalu

lintas perkotaan. Salah satu peran strategisnya adalah dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang meliputi pengaturan arus kendaraan, penempatan rambu dan marka jalan, serta pengoperasian alat pemberi isyarat lalu lintas untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, Dishub juga bertanggung jawab dalam manajemen parkir, baik yang bersifat *on-street* maupun *off-street*, termasuk dalam penataan zona parkir, pembinaan juru parkir, serta pengembangan sistem parkir elektronik guna meningkatkan transparansi dan efisiensi retribusi daerah. Dalam hal transportasi umum, Dishub melakukan penertiban terhadap trayek angkutan kota guna memastikan ketersediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih antar trayek. Tidak kalah penting, Dishub juga mengawasi keberadaan dan operasional moda transportasi daring (*online*), termasuk legalitas, kelayakan kendaraan, serta perlindungan terhadap penumpang. Keseluruhan fungsi ini menunjukkan bahwa Dishub berperan penting dalam menjaga keteraturan lalu lintas dan menjamin tersedianya transportasi yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan lokasi yang strategis untuk dijadikan objek penelitian karena instansi ini memiliki keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, serta evaluasi sistem transportasi dan perhubungan di wilayah kota. Sebagai instansi yang menangani aspek lalu lintas, angkutan umum, parkir, hingga pengujian kendaraan bermotor, peran Dishub sangat vital dalam menjamin terciptanya mobilitas yang aman, efisien, dan terintegrasi bagi masyarakat. Dinas ini tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga berperan sebagai regulator dan pengawas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi. Dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Bandar Lampung yang terus meningkat, keberadaan Dishub menjadi ujung tombak dalam menangani berbagai permasalahan transportasi, seperti kemacetan, parkir liar, trayek angkutan kota yang tidak tertib, serta munculnya transportasi daring yang menuntut regulasi baru. Oleh karena itu, meneliti peran, kebijakan, dan strategi Dishub dalam mengelola sistem transportasi akan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelayanan publik dan efektivitas tata kelola mobilitas masyarakat di kota besar.

4.4 Permasalahan Parkir di Kota Bandar Lampung

Permasalahan parkir di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu isu strategis dalam pengelolaan transportasi perkotaan yang kompleks dan multidimensional. Laju pertumbuhan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor dan mobil, mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan ini tidak diiringi dengan penyediaan infrastruktur parkir yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketimpangan tersebut memicu maraknya praktik parkir sembarangan, terutama di kawasan pusat kota yang memiliki intensitas aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, seperti di Jalan Raden Intan, Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan ruas-ruas jalan utama lainnya.

Fenomena parkir di badan jalan secara tidak resmi menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas, gangguan terhadap arus kendaraan, serta berkurangnya kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Tidak hanya berdampak pada efisiensi lalu lintas, kondisi ini juga berimplikasi terhadap citra tata kota dan efektivitas fungsi ruang publik. Ketidaktertiban perparkiran juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Perhubungan, dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penataan parkir menjadi salah satu fokus kebijakan transportasi yang membutuhkan pendekatan integratif antara perencanaan ruang, penegakan aturan, serta partisipasi masyarakat.

Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan dalam menata dan menertibkan sistem perparkiran telah dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti penetapan zona parkir resmi, pelaksanaan razia terhadap parkir liar, hingga rencana penerapan sistem parkir elektronik (*e-parking*) sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola transportasi berbasis digital. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Dari sisi infrastruktur, keterbatasan fasilitas parkir publik yang representatif, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya integrasi sistem pengawasan menyebabkan efektivitas kebijakan belum optimal. Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, jumlah

petugas lapangan yang terbatas, rendahnya kapasitas pengawasan, serta kurangnya pelatihan teknis juga turut menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di samping itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir masih rendah, ditandai dengan maraknya parkir sembarangan dan praktik parkir liar yang melibatkan oknum tidak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penataan parkir tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh kesiapan institusional, dukungan teknologi, serta kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek penegakan hukum, edukasi publik, dan sinergi antarlembaga untuk mewujudkan sistem perparkiran yang lebih tertib dan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Parkir liar di wilayah Kecamatan Kedaton disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) keterbatasan lahan parkir resmi di kawasan padat aktivitas seperti kampus, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan; (2) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari aparat berwenang; (3) adanya oknum juru parkir ilegal yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi; dan (4) rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib parkir dan dampaknya terhadap ketertiban umum.
2. Praktik parkir liar memberikan dampak sosial yang signifikan, antara lain: (1) kemacetan lalu lintas akibat terganggunya fungsi jalan umum; (2) menurunnya kenyamanan dan rasa aman pengguna jalan; (3) munculnya konflik sosial antara pengguna jalan, pedagang, dan juru parkir liar; serta (4) menurunnya citra pemerintah daerah karena dianggap lalai dalam menertibkan ruang publik, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja aparat.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Perhubungan, perlu meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap praktik parkir liar secara konsisten melalui pelaksanaan patroli rutin, pemasangan rambu larangan parkir yang jelas, serta penerapan sanksi tegas dan terukur kepada pelanggar guna menciptakan efek jera di tengah masyarakat. Upaya ini sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja dalam skema operasi gabungan yang terjadwal dan transparan, sehingga tidak hanya menindak pelanggaran secara reaktif tetapi juga mampu mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Di

samping itu, Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan jangka menengah dan panjang terkait penyediaan lahan parkir resmi yang memadai, mudah diakses, dan terjangkau, terutama di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi seperti sekitar kampus, rumah sakit, pasar, dan pusat perbelanjaan. Penyediaan fasilitas parkir alternatif ini harus dirancang dengan memperhatikan prinsip tata ruang kota yang efisien dan berkelanjutan, termasuk kemungkinan pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah, kerja sama dengan pihak swasta, atau penerapan teknologi digital untuk manajemen parkir yang lebih tertib dan transparan.

2. Diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan mengenai pentingnya tertib parkir dan bahaya laten dari praktik parkir liar yang dapat mengganggu kehidupan sosial, menciptakan ketegangan antarwarga, hingga membahayakan keselamatan publik, khususnya pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Edukasi ini harus dilakukan secara masif dan strategis dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti kampanye melalui media sosial, pemasangan baliho atau spanduk edukatif di titik-titik rawan parkir liar, serta penyebaran pesan melalui siaran radio lokal atau pengeras suara di ruang publik. Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama aktif dengan institusi pendidikan seperti kampus, komunitas lokal, serta pelaku usaha di wilayah Kedaton untuk bersama-sama membentuk budaya disiplin dan kepedulian terhadap ruang publik yang tertib dan aman. Kolaborasi ini penting agar pesan-pesan tertib parkir tidak hanya datang dari otoritas, tetapi juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan pelaku kegiatan harian, sehingga mampu membentuk kesadaran kolektif yang kuat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, W. (2021). *Manajemen Kota Berkelanjutan: Studi Infrastruktur dan Tata Ruang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azizah, R. (2023). Pendekatan Inklusif untuk Mencapai Harmoni Sosial. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(4), 55-72.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024). *Statistik Kecamatan Kedaton Tahun 2024*. Bandar Lampung: BPS.
- Budi, A. (2022). Hierarki Sosial dalam Masyarakat Multikultur. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 15-28.
- Darmawan, H. (2020). *Dinamika Sosial dan Ekonomi dalam Pengelolaan Perkotaan*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. (2024). *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan*. Bandar Lampung: Dishub.
- Haryanto, T. (2023). Peran Budaya Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 12(2), 45-60.
- Hasan, T. (2023). Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Parkir Liar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 132-148.
- Jaya, M., & Purnama, T. (2023). *The Impact of Illegal Parking on Traffic Flow and Urban Aesthetics: A Case Study*. *Journal of Urban Development Research*, 25(2), 67-84.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Moleong. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, D. (2024). Dampak Teknologi terhadap Kehidupan Sosial di Perkotaan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(3), 89-102.
- Putra, A. (2021). *Perilaku Menyimpang dalam Praktik Parkir Liar di Kawasan Komersial*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 45-62.

- Rahayu, S. (2021). Dampak Sosial Parkir Liar terhadap Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Kriminologi*, Vol.12 (3), 112-130.
- Saputra, R., & Wulandari, E. (2023). Ketidakadilan Sosial sebagai Fak Pendorong Tindak Kriminal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 18(1), 25-39.
- Sari, R. (2022). *Dinamika Konflik Sosial dalam Praktek Parkir Liar di Perkotaan*. Jurnal Studi Sosial, 10(2), 115-127.
- Siregar, R. (2021). *Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Transportasi Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Suryani, L. (2023). Pendidikan dan Interaksi Sosial: Sebuah Kajian. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 25-40.
- Wahyuni, F. (2024). Ketimpangan Ekonomi dan Konflik Sosial di Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 9(1), 33-50.
- Wijaya, A. (2023). Studi Kriminologi Parkir Liar di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 15 (1), 75-90.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Los Angeles: Sage Publications.
- Yuniarti, L. (2020). *Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Parkir Liar di Wilayah Perkotaan*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 8(4), 89-105.